



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN PT No. 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Kebijakan Pivot to Asia Oleh Amerika Serikat Pada
Masa Pemerintahan Barack Obama

Skripsi

Oleh

Joel Franklin Manalu

2012330157

Bandung

2017



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN PT NO. 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Kebijakan Pivot to Asia Oleh Amerika Serikat Pada
Masa Pemerintahan Barack Obama

Skripsi

Oleh

Joel Franklin Manalu

2012330157

Pembimbing

Prof. V. Bob Sugeng Hadiwinata, Ph.D

Bandung

2017

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Joel Franklin Manalu
Nomor Pokok : 2012330157
Judul : Kebijakan Pivot to Asia oleh Amerika Serikat Pada Masa Pemerintahan Barack Obama



Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Selasa, 8 Agustus 2017
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua sidang merangkap anggota
Idil Syawfi, S.IP., M.Si.

: 

Anggota
Dr. I Nyoman Sudira, Drs., M.Si

: 

Sekretaris
Prof. Victorianus Bob Sugeng Hadiwinata, Drs., M.A., Ph.D

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si



LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Joel Franklin Manalu

NPM : 2012330157

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : KEBIJAKAN PIVOT TO ASIA OLEH AMERIKA SERIKAT
PADA MASA PEMERINTAHAN BARACK OBAMA

Menyatakan bahwa dalam rancangan penelitian ini adalah hasil pekerjaan saya dan tidak mengandung unsur plagiarisme dalam bentuk apa pun. Karya ini murni dibuat oleh saya sendiri tanpa bantuan substantif berupa apapun yang diberikan oleh pihak lain dalam proses pengerjaannya – yang memungkinkan adanya penambahan materil yang bukan menjadi hak saya. Jika terbukti melakukan tindak ketidakjujuran, maka saya bersedia menerima dan menjalankan sanksi yang berlaku.

Bandung, 11 Agustus 2017



Joel Franklin Manalu

ABSTRAK

Nama : Joel Franklin Manalu
NPM : 2012330157
Judul : Kebijakan Pivot to Asia oleh Amerika Serikat Pada Masa
Pemerintahan Barack Obama

Amerika Serikat pada masa pemerintahan Barack Obama mengalami pergeseran kebijakan luar negeri secara signifikan, yang semula berfokus kepada Timur Tengah dalam melawan teroris, bergeser ke Asia. Kebijakan ini dinamakan *Pivot to Asia*. Penambahan kekuatan militer di kawasan Asia dan pembentukan organisasi ekonomi *Trans-Pasific Partnership* menjadi program utama kebijakan ini. Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi faktor pembuatan kebijakan ini dan dampaknya bagi Asia terutama China.

Jenis penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan metode penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan studi dokumen, dikarenakan ada keterbatasan akses antara peneliti dan subjek penelitian.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa faktor utama pembuatan kebijakan Pivot to Asia ini adalah krisis finansial dan kebangkitan Asia terutama China, serta didorong oleh kepribadian Barack Obama yang lebih mengutamakan kerjasama dan diplomasi antar negara.

Kata Kunci : Kebijakan Luar Negeri, Pivot to Asia, Amerika Serikat, Asia, China, Asia Century, Krisis Finansial, Barack Obama

ABSTRACT

Name : Joel Franklin Manalu

NPM : 2012330126

Title : *Pivot to Asia Policy by the United States during the Reign of Barack Obama*

The United States during the reign of Barack Obama underwent a significant shift in foreign policy, which originally focused on the Middle East against terrorists, shifted to Asia. This policy is called Pivot to Asia. The addition of military strength in the Asian region and the establishment of the Trans-Pacific Partnership economic organization became the main program of this policy. Based on the above background, this study aims to find out what is the factor of making this policy and its impact for Asia, especially China.

The type of research conducted in this thesis is a qualitative type of research with a case study method. The technique of data collecting conducted in this research is documents research study, due the limitations of access between the author of this thesis with the subject.

The results of this study explain that the main factor making Pivot to Asia policy is the financial crisis and the rise of Asia, especially China, and driven by the personality of Barack Obama who prefers cooperation and diplomacy between countries.

Keywords : *Foreign Policy, Pivot to Asia, USA, Asia, China, Asia Centu Financial Crisis, Barack Obama*

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, karena berkatNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Kebijakan Pivot to Asia oleh Amerika Serikat Pada Masa Pemerintahan Barack Obama”. Adapun penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana S-1 pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Dalam penyusunan penelitian skripsi ini, penulis mencoba memberikan yang terbaik walaupun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat hal-hal yang belum sempurna yang luput dari perhatian penulis, baik kekurangan atas teknik penyajian yang digunakan maupun bahasa yang digunakan. Singkat kata, penulis meminta maaf jika ada kesalahan dalam penulisan penelitian berikut. Jika ada kritik dan saran, penulis akan dengan senang hati menerimanya, dengan tujuan membangun menjadi lebih baik di kemudian hari.

Bandung, 11 Agustus 2017

Joel Franklin Manalu

UCAPAN TERIMAKASIH

1. Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat-Nya, serta kesabaran, keteguhan hati, kekuatannya ketika saya merasa putus asa, malas dan pada akhirnya menemukan semangat dalam proses pengerjaan skripsi ini.
2. Ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada Bapak Victor Manalu dan Ibu Lasria Sitohang selaku orang tua yang selalu senantiasa memberikan motivasi dan dukungan, baik secara moral maupun materiil. Tanpa mereka, skripsi ini tidak akan pernah ada dan penulis bukanlah siapa-siapa.
3. Teruntuk dosen pembimbing yaitu Prof. V. Bob Sugeng Hadiwinata, Ph.D. atas bimbingannya kepada penulis selama pengerjaan skripsi ini. Semua pelajaran yang pernah beliau berikan akan selalu penulis ingat dalam pengembangan diri penulis pada saat menghadapi dunia kerja kelak. Penulis secara pribadi mendoakan agar Mas Bob tetap sehat selalu agar bisa terus memberikan pengajaran serta arahan dengan kualitas terbaik yang pernah dirasakan oleh mahasiswa Hubungan Internasional UNPAR.
4. Terima kasih juga kepada *soulmate* Febyanti yang selalu menemani dalam susah maupun senang dan memberikan semangat, dan untuk sahabat-sahabat Muhammad Gilang Rihardika, Dehuy, Marsel, Bram, Febry, Egi, Olus, Handryan, Ivan, Kristian, Michael, dan yang mendukung penulis dan membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, juga pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

DAFTAR BAGAN DAN TABEL

Bagan 2.1 Perekonomian Kembali Bergeser ke Asia	24
Bagan 2.2 Pertumbuhan PDB Asia 1990-2015.....	25
Bagan 2.3 Total Produktifitas Negara-Nega.....	27
Bagan 2.4 Tren Angkatan Kerjadi Asia.....	28
Bagan 2.5 Persediaan Modal Dunia hingga 2050	29
Tabel 2.1 Jumlah Masyarakat kelas Menengah	30
Bagan 3.1 Militer Amerika Serikat di Asia	59

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	iv
UCAPAN TERIMAKASIH	v
DAFTAR BAGAN DAN TABEL	vi
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.2.1 Deskripsi Masalah.....	5
1.2.2 Pembatasan Masalah.....	11
1.2.3 Perumusan Masalah	11
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
1.3.1 Tujuan Penelitian	12
1.3.2 Kegunaan Penelitian	12
1.4 Kajian Literatur	12
1.5 Kerangka Pemikiran	13
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	19
1.6.1 Metode Penelitian	19
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data.....	19
1.7 Sistematika Pembahasan	20
BAB II.....	21
PERKEMBANGAN ASIA MUNUJU ASIA CENTURY DAN KEBANGKITAN CHINA	21
2.1 Asia Century	21
2.1.1 Asia 2010	23
2.1.2 Menuju Asia 2050	25

2.2.	Kebangkitan China	32
2.2.1	Kebangkitan China dalam segi ekonomi.....	32
2.2.2	Kebangkitan China dalam segi militer	38
BAB III.....		41
PIVOT TO ASIA SEBAGAI RESPON AMERIKA SERIKAT TERHADAP KEBANGKITAN ASIA TERUTAMA CHINA		41
3.1	Politik Luar Negeri Amerika Serikat pada masa pemerintahan Barack Obama.....	42
3.2	Dampak kebangkitan Asia terutama China beserta Respon Amerika Serikat	45
3.2.1	Pivot to Asia.....	52
3.3	Dampak Kebijakan Pivot to Asia bagi Asia terutama China.....	60
BAB IV		64
KESIMPULAN		64
DAFTAR PUSTAKA		70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Politik luar negeri itu pada dasarnya merupakan “*action theory*”, atau kebijaksanaan suatu negara yang ditujukan ke negara lain untuk mencapai suatu kepentingan tertentu. Secara pengertian umum, politik luar negeri (*foreign policy*) merupakan suatu perangkat formula nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan dunia internasional. Suatu komitmen yang pada dasarnya merupakan strategi dasar untuk mencapai suatu tujuan baik dalam konteks dalam negeri dan luar negeri serta sekaligus menentukan keterlibatan suatu negara di dalam isu-isu internasional atau lingkungan sekitarnya.¹ Politik luar negeri suatu negara didukung dengan adanya kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri mencerminkan arah politik luar negeri suatu negara. Suatu perangkat formula nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan dunia internasional ini dapat berubah seiring dengan pergeseran kepentingan suatu negara. Salah satunya adalah perubahan fokus kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang akan diteliti oleh penulis.

Amerika Serikat mengalami pergeseran fokus yang signifikan semenjak pemerintahan Barack Obama dalam bidang kebijakan luar negeri. Dalam masa

¹ Yanyan Mochamad Yani, “Politik luar negeri”, http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2010/01/politik_luar_negeri.pdf diakses pada tanggal 8 September 2015

jabatan Clinton dan Bush, Amerika Serikat memiliki fokus kebijakan luar negeri pada wilayah Timur Tengah dan Eropa, meskipun Amerika Serikat juga telah menaruh perhatian yang cukup besar pada wilayah Asia Timur dengan menempatkan sejumlah pasukan dan sistem persenjataan di Jepang dan Guam. Selain itu, Bush juga menempatkan sebuah aircraft carrier tambahan pada wilayah administratif Pasifik. Pentagon juga mengumumkan pada tahun 2005 bahwa mereka akan menempatkan 60% dari seluruh kapal selam Amerika Serikat di Asia².

Namun pada masa pemerintahan Obama, fokus tambahan pada wilayah Asia Timur mulai diterapkan. Masa administrasi 2012 Obama merupakan awal penerapan strategi regional “Pivot to East Asia”³. Strategi ini sendiri memiliki fokus pada bidang-bidang seperti memperkuat kerjasama keamanan bilateral, meningkatkan hubungan kerja dengan kekuatan-kekuatan ekonomi yang baru berkembang, berpartisipasi dalam institusi multilateral regional, memperluas perdagangan dan investasi, memperluas basis kekuatan militer, dan juga meningkatkan demokrasi dan penegakan hak asasi manusia di Asia Timur. Hillary Clinton menyatakan bahwa dalam satu dekade ke depan Amerika Serikat akan memfokuskan waktu dan tenaganya dalam meningkatkan kerjasama diplomatik, ekonomi, dan investasi pada wilayah Asia Pasifik. Amerika Serikat memiliki strategi untuk meningkatkan kerjasama dengan negara-negara ‘emerging powers’

² Robert S Ross, “The Problem with the Pivot: Obama’s New Asia Policy Is Unnecessary and Counterproductive” dalam *Foreign Affairs* edisi November/Desember 2012, <https://www.foreignaffairs.com/articles/asia/2012-11-01/problem-pivot> diakses pada tanggal 8 September 2015

³ Richard C. Bush III, “The Response of China’s Neighbors to the U.S. “Pivot” to Asia” dalam studi Brookings Institute, <http://www.brookings.edu/research/speeches/2012/01/31-us-pivot-bush> diakses pada tanggal 8 September 2015 pada pukul 20.39

seperti India di Asia Tengah dan Indonesia di Asia Tenggara, dan di Asia Timur perkembangan pesat Tiongkok adalah salah satu perhatian terbesar Amerika Serikat. Lebih lanjut lagi, Hillary Clinton menyatakan bahwa integrasi kerjasama Amerika Serikat dan Asia sangat penting bagi masa depan kedua wilayah⁴.

Dalam hal pergeseran fokus Amerika Serikat dan strategi pivot, Kurt Campbell (Assistant Secretary of State for East Asian and Pacific Affairs) menyatakan bahwa walaupun isu-isu dominan pada abad 21 akan ditentukan oleh dan dalam jangkauan wilayah Asia Timur dan Pasifik, Amerika Serikat akan masuk dan mengikutsertakan diri di Asia Timur dan Pasifik secara bertahap. Pivot ke arah Asia dikatakannya tidak akan bisa dilakukan hanya dalam jangka waktu beberapa tahun, tetapi memerlukan alokasi diplomatik dan sumber daya militer yang konsisten. Campbell juga menyatakan bahwa Amerika Serikat harus menyadari bahwa negara-negara lain dalam kawasan Asia Timur memiliki kepentingannya masing-masing terhadap Tiongkok, dan hal ini akan menjadikan hubungan antara Amerika Serikat dan Tiongkok sebuah hubungan yang rumit tetapi amat vital dalam mengelola isu-isu keamanan dan ekonomi internasional pada abad ini. Isu hak asasi manusia di Tiongkok juga dikatakan sebagai elemen yang tidak dapat dipisahkan dari kebijakan-kebijakan di bidang keamanan dan ekonomi Amerika Serikat dalam pendekatannya ke Tiongkok. Isu ini diakui sebagai salah satu isu yang paling sulit untuk ditangani, tapi Amerika perlu untuk

⁴ Hillary Clinton, “America’s Pacific Century” dalam Foreign Policy, <http://www.foreignpolicy.com/2011/10/11/americas-pacific-century/> diakses pada tanggal 8 September 2015

menaruh perhatian padanya karena ia berkaitan erat dengan promosi dan peningkatan demokrasi di kawasan Asia Timur⁵.

Selain mempererat hubungan kerjasama dengan Jepang yang telah terjalin sejak lama dan mengatasi isu keamanan dengan Korea Utara, jelas terlihat bahwa perhatian utama Amerika Serikat pada kawasan Asia Timur adalah perkembangan pesat Tiongkok. Hal ini memancing reaksi yang beragam dari negara-negara lain di Asia Timur. Sebagai contoh, masyarakat Korea Selatan yang biasanya memiliki pandangan positif dan posisi pro terhadap Amerika Serikat, pada kasus ini mulai mengkritik ketergantungan diplomatik presiden mereka terhadap Amerika Serikat. Masyarakat Korea Selatan justru mendorong pemerintahannya untuk memperkuat hubungan dengan Tiongkok, membuktikan bahwa setiap negara dalam kawasan Asia Timur memiliki ketertarikan masing-masing terhadap Tiongkok dan membuat situasi dalam kawasan menjadi pelik⁶. Yang perlu dilakukan Amerika Serikat pada situasi seperti ini adalah membentuk opini masyarakat Asia Timur, sejalan dengan agenda rebalancing yang dimilikinya. Untuk mengimbangi pengaruh Tiongkok di Asia Timur, motif Amerika Serikat disinyalir berdasarkan beberapa faktor. Ekonomi merupakan salah satu faktor yang tidak dapat terlewatkan, seperti juga keamanan internasional. Tetapi, faktor yang mendasari hal-hal tersebut bisa dianalisa sebagai ideologi atau kepentingan negara secara realistis. Ideologi dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh Amerika Serikat terlihat dari berbagai

⁵ Foreign Policy Initiative, "The Obama Administration's Pivot to Asia" dalam Foreign Policy Initiative, <http://www.foreignpolicy.org/content/obama-administrations-pivot-asia> diakses pada tanggal 8 September 2015

⁶ Richard C. Bush III, "The Response of China's Neighbors to the U.S. "Pivot" to Asia" dalam studi Brookings Institute, <http://www.brookings.edu/research/speeches/2012/01/31-us-pivot-bush> diakses pada tanggal 8 September 2015

pernyataan oleh pejabat resmi Amerika Serikat yang menyatakan bahwa demokratisasi dan penegakan hak asasi manusia di Asia Timur merupakan bidang yang perlu diberi perhatian lebih, mengingat. Hal tersebut bisa dicapai dengan memperbesar pengaruh Amerika Serikat di Asia Timur melalui partisipasi dalam kawasan dan peningkatan kerjasama yang lebih terintegrasi baik secara bilateral atau multilateral. Pemenuhan tujuan tersebut bisa dibilang sebagai sisi realistis dari agenda Amerika Serikat di Asia Timur yang lebih berhubungan dengan kepentingan nasional negaranya, tetapi mudah untuk disimpulkan bahwa kedua sisi dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Asia Timur ini saling terkait dan mendukung satu sama lain.

1.2 Identifikasi Masalah

1.2.1 Deskripsi Masalah

Kebijakan luar negeri Amerika Serikat ke kawasan Asia Timur sebenarnya tidak terjadi ketika pada masa pemerintahan Barrack Obama saja, melainkan sudah terjadi sejak setelah era Perang Dingin. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat ke kawasan Asia Timur dalam segi militer akan dibahas secara singkat oleh penulis.

Pasca Cold War yang ditandai dengan runtuhnya Uni Sovyet, Amerika Serikat mulai melakukan fokus kebijakan luar negerinya ke kawasan-kawasan yang lain, tidak hanya pada Eropa saja. Salah satu fokus Amerika Serikat adalah ke kawasan Asia Timur. Hal ini ditandai pada tahun 1995 Amerika Serikat

melakukan Enhancement of Defence Cooperation dengan Jepang. Kerja sama ini menghasilkan kesepakatan terhadap 'Revised Guidelines' untuk kerja sama militer di aliansi⁷. Sejak saat itu, kerja sama fungsional antar kedua angkatan militer dari kedua negara secara signifikan menjadi diperluas. Pada masa pemerintahan Bush dan Clinton kedua negara ini saling berkoordinasi perihal aktivitas angkatan laut untuk persiapan apabila terjadi konflik di kawasan Asia Timur.

Pada tahun 1996 terjadi konfrontasi di Selat Taiwan antara Pemerintah Tiongkok dan Taiwan. Hal tersebut menjadi katalisator atau perubah pivot Amerika Serikat dari Eropa ke Asia⁸. Gerakan kemerdekaan Taiwan memicu reaksi keras dari pemerintah Tiongkok dan hal tersebut mengundang Amerika Serikat untuk hadir didalam konflik ini. Konflik ini dapat memicu ketegangan antara pemerintah Tiongkok dan juga Amerika Serikat. Maka dari itu pada tahun 1999, Amerika Serikat melalui US Department of Defense mulai mengkaji ulang posisinya di kawasan Asia Timur dengan memindahkan kapabilitas Militernya dari Eropa ke Asia Timur⁹.

Pada tahun 2000, pada saat masa jabatan Bill Clinton, Amerika Serikat memindahkan salah satu kapabilitas militernya yang canggih yaitu Los Angeles Class Submarine dari Eropa untuk berjaga – jaga dikawasan Asia Timur. Satu dekade berikutnya pada tahun 2010 saat masa Barack Obama, Amerika Serikat mulai menyebarkan unit unit dari sistem persenjataan canggihnya di kawasan

⁷ Robert S. Ross, "The Fate of The Pivots: U.S. Policy in East Asia", http://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2014/07/PR140301_The_Fate_of_the_Pivot.pdf diakses pada tanggal 8 September 2015

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

Asia Timur seperti Fighter Planes F-15 dan F-16, B1 dan B2 Bombers, Los Angeles dan Virginia- Class Attack Submarines. Selain itu juga US Department of Defence membangun 'War Time Crisis Operation Center' di Guam, Pasifik¹⁰.

Pada tahun 2010 terjadi Tragedi Choenan, yaitu, tragedi penyerbuan yang dilakukan Korea Utara terhadap kapal perang Korea Selatan. Dengan penyerbuan ini pun, Korea Selatan meminta bantuan kepada Amerika Serikat. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah tentara Amerika Serikat di Korea Selatan dan frekuensi latihan gabungan Amerika Serikat dan Korea Selatan juga meningkat.

Akhir tahun 2011, Pemerintahan Amerika Serikat masa Presiden Barrack Obama menandatangani keputusan Fiscal Year 2012 mengenai rencana postur pertahanan dan penempatan pasukan dibawah USPACOM (United State Pacific Command).¹¹

Pada tahun 2012 seiring dengan dicetuskannya kebijakan 'Pivot to Asia' oleh Obama Pentagon membuat rencana untuk mengembangkan kapabilitas militer di Korea Selatan. Kerjasama militer yang meningkat antara Amerika Serikat dan Korea Selatan ini membuat Korea Utara merasa terancam sehingga meningkatkan *weapon missile defense* dengan gencar. Namun hal tersebut mengganggu China dan memberikan *economic sanctions* kepada Korea Utara.

Pada pemerintahan Barack Obama, hal yang paling terlihat adalah penempatan pasukan ke Australia dan Singapura yang menjadi aliansinya. Pada maret 2012, pemerintahan Amerika Serikat dan Singapura mencapai kesepakatan kerjasama keamanan baru dimana Amerika Serikat akan menempatkan dua

¹⁰ *Ibid*

¹¹ USPACOM, <http://www.pacom.mil/AboutUSPACOM.aspx> diakses pada 8 September 2015

hingga empat Littoral Combat Ship (LCS) di pangkalan angkatan laut Singapura yang sifatnya rotasional. LCS merupakan kapal perang dengan ukuran relatif kecil dan ditujukan untuk beroperasi di wilayah pesisir yang tidak terlalu luas. Dilengkapi dengan flight deck dan hangar, LCS merupakan kapal tempur yang efisien dan berkecepatan tinggi dengan daya tampung hingga 75 orang. Pada kawasan Asia tenggara memegang peranan yang cukup signifikan dalam kebijakan militer Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik. Diantaranya melakukan latihan gabungan militer multinasional antara militer Amerika Serikat dengan militer Thailand dan beberapa negara Asia lainnya dilakukan secara rutin di Thailand setiap tahunnya yang dikenal dengan nama *Cobra Gold Exercise* yang bertujuan sebagai komitmen Amerika Serikat dan Thailand sebagai aliansinya terhadap keamanan dan stabilitas kawasan Asia Pasifik.

Pada tahun 2013, karena Amerika Serikat dan China merasa terancam dengan pengembangan *weapon missile defense* yang dilakukan Korea Utara. Amerika Serikat dan China memperbaharui hubungannya dengan puncaknya diadakan pertemuan di Sunnyland, California.. Diplomasi *military to military* antara Amerika Serikat dan China semakin meningkat ditandai dengan dibentuknya RIMPAC (Rim Of The Pasific).

Dan ditahun yang sama juga, Amerika Serikat menempatkan P-8 Antisubmarine Aircraft di Jepang dengan tujuan merevisi kerjasama pertahanan dengan Jepang¹².

¹² Robert S. Ross, "The Fate of The Pivots: U.S. Policy in East Asia", http://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2014/07/PR140301_The_Fate_of_the_Pivot.pdf diakses pada tanggal 8 September 2015

Meningkatnya jumlah tentara Amerika Serikat di Asia Timur dan Pasifik tidak berbanding lurus dengan menurunnya total tentara Amerika Serikat di dunia. Menurunnya total tentara Amerika Serikat di dunia ini disebabkan oleh krisis yang terjadi pada tahun 2008 yang mau tidak mau memaksa Amerika Serikat untuk melakukan pemangkasan biaya militer, dengan cara mengurangi personel militernya secara bertahap. Namun, jumlah tentara Amerika Serikat di kawasan Asia justru semakin bertambah. Hal ini membuat penulis ingin mencari tahu apa yang menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan tersebut, faktor-faktor apa saja yang membuat Asia menjadi fokus kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam segi militer, padahal kondisi kawasan lain seperti kawasan Timur Tengah sedang dalam kondisi yang tidak stabil dan kian memanas dan bisa dikatakan lebih membutuhkan bantuan militer Amerika Serikat.

Dalam segi ekonomi sendiri Amerika Serikat memiliki kontribusi untuk mendukung pertumbuhan dan pencapaian yang ada di Asia, yaitu yang pertama adalah kebijakan *rebalance* yang terdiri dari beberapa aspek yang dimana setiap aspeknya berkontribusi untuk memfasilitasi dan mendukung perkembangan ekonomi Asia Timur dengan cara meningkatkan keamanan kawasan yang penting bagi perkembangan ekonomi. Karena pada dasarnya konflik dan perdagangan merupakan hal yang sangat berbeda sehingga Amerika Serikat meningkatkan kerjasamanya dengan Jepang, hal ini menghasilkan pembaharuan pedoman pertahanan bilateral yang pertama. Hal ini merupakan bagian dari diskusi transparan mengenai pertahanan kolektif Amerika Serikat. Kedua adalah dengan memperkuat hubungan dengan China dimana direncanakannya kunjungan

presiden China yaitu Xi Jinping ke Amerika Serikat pada September yang akan datang. Hal ini bertujuan untuk melanjutkan diskusi tahun lalu mengenai ekonomi dan strategi. Ketiga adalah melalui Trans-Pacific Partnership atau biasa disebut dengan TPP.

TPP sendiri merupakan sebuah perjanjian ekonomi yang menetapkan standar yang tinggi pada tenaga kerja, kekayaan intelektual, lingkungan, dan tingkat lapangan bermain untuk bisnis. Hal ini akan membuka pasar baru bagi Asia Timur dan hal ini akan memperluas perdagangan di wilayah yang sudah merupakan satu-sepertiga dari semua perdagangan global dan hal ini akan membawa pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja untuk semua pesisir Amerika Serikat. Seperti pada contohnya, para ekonom memprediksi akan menambahnya \$100 miliar GDP Jepang pada dekade berikutnya. TPP sendiri bukanlah merupakan sekedar perjanjian tetapi TPP lebih mengarah kepada peluang ekonomi yang ditawarkan, TPP adalah suatu kesempatan strategi untuk seluruh wilayah Asia Timur. Ada tiga prinsip dasar mengapa TPP didirikan yaitu yang pertama adalah TPP akan membangun fondasi dan aliansi yang kuat yang menjamin kemakmuran dan keamanan hal ini akan meyakinkan sekutu bahwa komitmen jangka panjang di wilayah ini akan mencapai lebih dari sekedar keamanan dan akan menjadi dimensi yang baru dari keberadaan Amerika Serikat di Asia Timur. Kedua adalah TPP akan menarik Negara non-anggota TPP dari keuntungan yang ditawarkan yang dimana hal ini akan memacu Negara non anggota TPP untuk menurunkan tarif dan hambatan non-tariff bagi perdagangan

dan investasi. Pada akhirnya hal ini akan mengajak mereka memasuki dunia liberal dan ekonomi terbuka.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis membatasi kajian permasalahan pada kebijakan 'pivot to Asia' oleh Amerika Serikat pada masa pemerintahan Barack Obama tepatnya pada tahun 2009. Penulis membatasi dari tahun 2009 sampai 2012 karena Barack Obama menjabat menjadi presiden Amerika Serikat mulai tahun 2009 dan pengambilan keputusan dilakukan pada tahun 2012. Penulis juga membatasi kajian penelitian ini hanya dalam segi militer.

1.2.3 Perumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah

1. Apa yang menjadi faktor-faktor dan tujuan Amerika Serikat membuat kebijakan 'Pivot to Asia' pada masa pemerintahan Barack Obama ?
2. Bagaimana dampak yang dihasilkan dari kebijakan Pivot to Asia ini bagi Asia terutama China ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang membuat Amerika Serikat pada masa pemerintahan Barack Obama membuat kebijakan luar negeri “Pivot to Asia” dan mengetahui tujuan dari kebijakan tersebut.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah untuk memberi informasi sekaligus menambah pengetahuan pembaca terutama dalam pengambilan keputusan tentang kebijakan luar negeri dalam segi militer oleh suatu negara melalui contoh kasus yang diteliti oleh penulis.

1.4 Kajian Literatur

Untuk melakukan penelitian ini, penulis menggunakan buku *American Foreign Policy* yang ditulis oleh Eugene R Wittkoff, Charles W Jr Kegley, dan James M Scott. Buku ini berisi tentang prinsip atau pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk menganalisa kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Buku ini juga menjelaskan tentang pola dan proses dalam pembuatan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Dalam buku ini dijelaskan berbagai faktor atau sumber yang utama dalam pembuatan kebijakan luar negeri Amerika Serikat, seperti sumber eksternal, sumber sosial, sumber pemerintahan, sumber peranan dan sumber

individu. Buku ini dijadikan referensi oleh penulis dalam pemilihan teori atau pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini.

Selanjutnya penulis menggunakan buku *Asia 2050: Realizing the Asia Century* yang dipublikasikan oleh Asian Development Bank. Buku ini berisikan bagaimana Asia Century bisa terjadi pada 2050, mulai dari skenario hingga tantangan yang harus dihadapi negara-negara di Asia. Buku ini digunakan oleh penulis untuk menjelaskan keadaan Asia terutama China yang menjadi pemicu adanya kebijakan Pivot to Asia oleh Amerika Serikat pada masa pemerintahan Barack Obama.

Penulis juga menggunakan beberapa jurnal yang berguna bagi penelitian, diantaranya adalah jurnal “*The Fate of The Pivots: U.S. Policy in East Asia*” yang ditulis oleh Robert S. Ross, “*The Response of China’s Neighbors to the U.S. “Pivot” to Asia*” yang ditulis oleh Richard C. Bush III, “*America’s Pacific Century*” yang ditulis oleh Hillary Clinton. Penulis menggunakan beberapa jurnal tersebut sebagai sumber informasi dalam menyelesaikan penelitian.

Penulis juga tidak menutup kemungkinan akan adanya penambahan sumber seperti buku atau jurnal lain untuk membantu dalam menyelesaikan penelitian.

1.5 Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini, penulis menggunakan konsep yang dicetuskan oleh James N. Rosenau yaitu sumber-sumber dalam pengambilan kebijakan luar negeri berupa sumber sistemik, sumber masyarakat, sumber pemerintahan, dan sumber

idiosinkratik. Sumber sistemik merupakan sumber yang berasal dari lingkungan eksternal suatu negara. Sumber masyarakat merupakan sumber yang berasal dari lingkungan internal. Sumber pemerintahan merupakan sumber internal yang menjelaskan tentang pertanggung jawaban politik dan struktur dalam pemerintahan. Sumber idiosinkratik merupakan sumber internal berupa nilai-nilai pengalaman, bakat serta kepribadian elit politik yang mempengaruhi persepsi, kalkulasi, dan perilaku mereka terhadap kebijakan luar negeri.¹³ K.J Holsti juga mengeluarkan argumen bahwa kebijakan luar negeri adalah strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional. Terdapat 5 landasan sumber pembuatan kebijakan luar negeri Amerika Serikat, kelima landasan itu adalah¹⁴:

1. Sumber eksternal

Meliputi atribut-atribut yang ada pada sistem internasional dan pada karakteristik serta sikap suatu negara dalam menjalaninya. Sumber eksternal mencakup perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal, kebijakan dan tindakan dari negara lain baik itu konflik maupun kerjasama, ancaman, dukungan yang baik secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara.

¹³ Yanyan Mochamad Yani,, “Politik luar negeri”, http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2010/01/politik_luar_negeri.pdf diakses pada tanggal 8 September 2015

¹⁴ Eugene R Wittkoff, Charles W Jr Kegley, dan James M Scott, *American Foreign Policy*, 6th edition (United Stated Thomson Wadsworth, 2003), hal 16-19

2. Sumber masyarakat

Seluruh karakteristik sosial domestik dan sistem politik yang membentuk orientasi masyarakat terhadap dunia. Intinya adalah seluruh aspek non-pemerintah dari sistem politik yang mempengaruhi kebijakan luar negeri. Hal ini meliputi keadaan geografis, etnis, nilai atau norma yang berkembang dimasyarakat, populasi, opini publik, dan lain-lain.

3. Sumber Pemerintah

Meliputi seluruh elemen dari struktur pemerintah yang memberikan pertimbangan-pertimbangan akan pilihan kebijakan luar negeri baik yang sifatnya memperluas atau membatasi pilihan yang akan diambil oleh para pembuat kebijakan, tentunya dalam lingkungan serta interaksi antar pihak-pihak di dalam pemerintahan.

4. Sumber peranan

Peranan disini terkait dengan peranan atau status dari pemerintah sebagai pembuat keputusan.

5. Sumber individu

Meliputi nilai-nilai dari seorang pemimpin atau pengambil keputusan sebagai ideologinya, pengalaman hidupnya, masa kecilnya, latar belakang pendidikannya, segala sesuatu yang mempengaruhi persepsinya, karakter, dan lain-lain. Hal-hal ini lah yang mempengaruhi persepsi, pilihan-pilihan dan respon atau reaksi dari seorang pengambil keputusan.

Dari kedua konsep tersebut diatas, yaitu Rosenau dan K.J Holsti, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa keputusan dalam pengambilan kebijakan

luar negeri tidak akan pernah lepas dari faktor internal suatu negara, seperti faktor ekonomi, faktor politik dalam negeri, faktor sosial, peranan LSM, kelompok kepentingan dan lain-lain. Selain itu faktor eksternal juga tetap menjadi pertimbangan dalam pengambilan sebuah kebijakan luar negeri suatu negara, dengan saling mengkondisikan antara faktor internal dan eksternal maka akan terbentuk lah sebuah kebijakan yang sesuai dengan keinginan nasional negaranya masing-masing. Konsep ini digunakan penulis untuk menganalisis faktor/sumber apa saja yang mempengaruhi pembuatan kebijakan Pivot to Asia oleh Amerika Serikat.

Selanjutnya penulis juga menggunakan konsep kepentingan nasional. Kepentingan nasional sangat penting dalam memahami dan menjelaskan perilaku internasional. Kepentingan nasional ini dijadikan sebagai acuan untuk merumuskan suatu kebijakan pada suatu negara. Para penganut realis menyamakan kepentingan nasional dengan *power*, dimana *power* menjadi sebuah alat yang dapat mengembangkan dan memelihara kontrol suatu hubungan negara dengan negara lainnya.

Hans J. Morgenthau mengemukakan mengenai kepentingan nasional yaitu, *the concept of the nation interest, then, contains 2 elements, 1 that is logically required and in that scene necessary, and 1 that is variable and determined by circumstances*¹⁵. Menurutnya kepentingan nasional terdiri dari 2 elemen yaitu didasarkan pada pemenuhan sendiri atau kebutuhan dalam negeri itu sendiri dan

¹⁵ Martinus Siswanto Prajogo, *Kepentingan Nasional: Sebuah Teori Universal dan Penerapannya oleh Amerika Serikat di Indonesia*. Jakarta, 2009, www.strahan.kemhan.go.id/media/files/kepentingan-nasional.pdf diakses pada tanggal 8 september 2015

kedua mempertimbangkan lingkungan strategis sekitarnya atau kondisi luar dari negaranya. Sehingga pemenuhan dalam negeri dapat dilakukan dengan cara mempertahankan kedaulatan wilayah negara, stabilitas politik dalam negeri, menjaga identitas budaya dari ancaman negara lain. Sedangkan yang dimaksud dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis adalah dengan cara menciptakan perdamaian dunia melalui diplomasi.

Kepentingan nasional ini juga dikemukakan oleh pakar pengamat hubungan internasional yaitu Charles W Kegley dan Eugene R Wittkopf. Menurut mereka kepentingan nasional adalah suatu usaha negara dalam memberikan rasa aman terhadap warga negaranya baik dari agresi luar atau dalam negeri itu sendiri, kesejahteraan terhadap rakyatnya, dan melindungi nilai-nilai negara. Mereka juga mengemukakan bahwa tidak mungkin suatu negara dapat mencapai kepentingan nasionalnya harus dengan mengurangi rasa aman dan rasa kesejahteraan terhadap kompetitornya. Sehingga diperlukan kerjasama dengan negara lain baik kerjasama yang bersifat regional maupun internasional demi terciptanya perdamaian global.¹⁶ Konsep ini digunakan penulis sebagai karena dalam pengambilan kebijakan luar negeri Amerika Serikat tentu saja berkaca kepada kepentingan nasionalnya yang mempengaruhi perilaku Amerika Serikat dalam dunia internasional.

Teori berikutnya yang digunakan adalah teori Stabilitas Hegemoni yang usulkan oleh Charles P. Kindleberger yang berpendapat bahwa untuk menjaga stabilitas di arena internasional harus ada negara dominan yang mampu

¹⁶ Ibid

menyediakan barang publik. Disebutkan bahwa pemeliharaan tatanan ekonomi internasional liberal membutuhkan dukungan jangka panjang dan kepemimpinan dari kekuasaan hegemonik yang memiliki kemampuan ekonomi, politik, dan militer untuk mengontrol pengaturan norma-norma politik dan ekonomi internasional.¹⁷

Terakhir penulis akan menggunakan teori *Balance of Threat* yang dikemukakan oleh Stephen Walt. Teori ini menekankan bahwa perilaku negara dalam membentuk aliansi bukanlah untuk mengimbangi kekuatan lawan, melainkan untuk mengatasi ancaman yang ada. Walt berpendapat negara memutuskan melakukan upaya aliansi dalam merespon ancaman dapat dilakukan dengan 2 strategi utama, yaitu *balancing* dan *bandwagoning* yang dilakukan ketika negara mendapat ancaman eksternal.¹⁸ Dalam *balancing*, negara melakukan aliansi dengan pihak lain untuk menghadapi negara yang memberikan ancaman, aliansi biasanya dilakukan dengan negara yang lebih lemah. Sedangkan *bandwagoning*, negara melakukan pendekatan dengan negara yang memberikan ancaman atau dengan negara yang lebih kuat. *Balanced of Threat* dalam melihat seberapa jauh kekuatan lawan menggunakan daya ukur untuk melakukan perimbangan ancaman. Yang pertama adalah aggregate power (total kekuatan negara) dengan melihat jumlah populasi, ekonomi, militer dan kecakapan teknologi. Yang kedua adalah geographic proximity (kedekatan geografis) dengan melihat jarak geografi. Yang ketiga adalah offensive power (kekuatan offensif)

¹⁷ Charles Kindleberger, *The World in Depression 1929-1939*, 1973, dalam <http://www.people.fas.harvard.edu/~plam/irnotes07/Kindleberger1981.pdf> diakses pada 20 Juli 2017

¹⁸ Stephen M Walt, "Alliance Formation and The Balance of World Power." Hal.4.

dengan melihat jumlah angkatan bersenjata dan senjata nuklir. Dan yang terakhir adalah aggressive intention (intensi agresif) dengan melihat kemampuan menunjukkan sifat yang agresif terhadap lawan.¹⁹

Dengan konsep ini, penulis mencoba untuk melihat faktor-faktor yang menjadi sumber dibuatnya kebijakan *Pivot to Asia*..

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode dengan mengumpulkan data berupa teks dan gambar, yang kemudian di analisis dan dijadikan kesimpulan. Metode penelitian kualitatif juga bersifat deskriptif. Dalam penelitian kualitatif, penulis menggunakan landasan teori sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta lapangan.²⁰

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pengumpulan data sekunder. Pengumpulan data sekunder adalah pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang diperoleh berupa jurnal, buku, teks, internet serta hasil penelitian terdahulu.²¹

¹⁹ Ibid hal 5

²⁰ Yin Robert K. "Case Study Research, Design and Methods", (2nd edition vol.5, London, SAGE Publication) Hlm 3-6

²¹ Ibid

1.7 Sistematika Pembahasan

Pada penulisan akademik ini, penulis akan mambagi menjadi lima bab yang akan dijabarkan sebagai berikut: Pada bab I, akan dijelaskan tentang latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang diangkat oleh penulis. Kemudian penulis akan menjelaskan tujuan penelitian yang dilakukan, kajian literatur atau pustaka serta kerangka pemikiran yang menjadi landasan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Pada bab II, penulis akan menjabarkan tentang kondisi dan kebangkitan Asia terutama Kebangkitan China.

Pada bab III, penulis akan melakukan analisis untuk mengenai kebijakan Pivot to Asia oleh Amerika Serikat dengan memperhatikan kondisi Asia terutama China serta dampak dan respon Amerika Serikat.

Pada bab IV, berisi tentang kesimpulan dari penelitian ini.